

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kantor Kesyahbandaran Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Batang merupakan Unit Pelaksana Teknis dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jendral Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan.

Dalam pelaksanaan tugas kepala Kantor Kesyahbandaran Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Batang dibantu oleh petugas yang terdiri : Petugas Tata Usaha, Petugas Lalu Lintas Angkatan Laut dan Pelayanan Jasa, Petugas Fasilitas Pelabuhan dan Ketertiban, serta Petugas Kesyahbandaran.

Kantor Kesyahbandaran Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Batang adalah termasuk pelabuhan yang belum diusahakan berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 62 Tahun 2010 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM : 130 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja, Kantor Kesyahbandaran Unit Penyelenggara Pelabuhan Batang berada di lokasi desa Klidang Lor Kecamatan Batang dan merupakan Kecamatan yang berada di Kabupaten Batang. Adapun batas wilayah desa Klidang Lor sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Laut Jawa
Sebelah Timur	: Kabupaten Kendal
Sebelah Selatan	: Kabupaten Banjarnegara
Sebelah Barat	: Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan

Titik koordinat Pelabuhan Batang: 06° 51' 46,7" LS dan 109° 40' 19,5" BT dan telah memiliki batas-batas Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKP) seluas : 78.864,16 Ha sesuai Keputusan Menteri Perhubungan Nomor

:KM.26 Tahun 2000, juga telah memiliki Rancangan Master Plane Pelabuhan Batang Tahun 2008.

Pelabuhan Batang merupakan pelabuhan yang melayani kegiatan antar pulau, dimana letaknya berada di dalam sungai Silunggonggo dengan jarak tempuh muara ke pelabuhan kurang lebih 5 mil, kunjungan kapal ke pelabuhan Batang tiap tahunnya mengalami peningkatan dengan ukuran kapal antara : 7 GT sampai 220 GT dimana dapat dilihat dari tabel kunjungan kapal 5 tahun terakhir. Aliran sungai Silunggonggo yang membawa lumpur dan mengendap di muara dan berfungsi sebagai alur pelayaran menyebabkan pendangkalan/sedimentasi. Untuk menjaga kedalaman alur pelayaran supaya kapal-kapal yang masuk/keluar pelabuhan aman dan lancar, diperlukan adanya kegiatan pengerukan alur pelayaran/perawatan (*maintenance*) yang diusulkan ke pemerintah pusat melalui dan APBN.

Keberadaan pelabuhan Batang mempunyai peranan penting dalam mendorong perekonomian daerah khususnya di Kabupaten Batang disaat dilihat dari banyaknya industri yang berkembang khususnya perikanan antara lain industri pengolahan ikan, tempat penyimpanan ikan (*coold storage*) dan mobilitas kendaraan roda empat yang mengangkut ikan ke luar daerah sehingga dari kegiatan tersebut dapat menyerap tenaga kerja dan membantu program pemerintah dalam mengurangi pengangguran dengan adanya kunjungan kapal-kapal yang masuk ke pelabuhan dan melakukan kegiatan bongkar/muat barang antar pulau dapat menambah devisa negara.

Pelayaran merupakan bagian dari sarana transportasi laut sebagaimana amanat Undang-Undan No. 17 tahun 2018 menjadi suatu yang sangat strategis bagi wawasan nasional. Pelayaran mempunyai karakteristik dan keunggulan tersendiri yang perlu dikembangkan dengan memperhatikan sifatnya yang padat moda, sehingga mampu meningkatkan pelayanan yang lebih luas, baik didalam negeri maupun dari luar negeri, oleh karenanya, permasalahan keselamatan dan keamanan dalam pelayaran merupakan tanggung jawab besar yang perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah dalam upaya

mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Dalam usaha untuk mewujudkan keadaan tersebut, tentunya pemerintah mempunyai peran penting yang menunjang kelancaran pelayaran melalui instansi pemerintah yaitu Kantor Kesyahbandaran Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Batang adalah Unit pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jendral Perhubungan Laut. Kantor Kesyahbandaran Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Batang mempunyai tugas Melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum dibidang keselamatan dan keamanan pelayaran, serta koordinasi kegiatan pemerintah di pelabuhan. Kantor Kesyahbandaran Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Batang mempunyai peran penting dalam mewujudkan sistem pelayaran yang baik.

Kantor Kesyahbandaran Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Batang adalah instansi pemerintah dibawah direktorat Jendral Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan yang bertugas melaksanakan pengawasan, penegakan hukum dibidang keselamatan dan keamanan pelayaran, koordinasi kegiatan pemerintah, peraturan, pengendalian, pengawasan kegiatan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersil di Pelabuhan Batang sesuai KM. 36 tahun 2012 tentang kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan. Tugas pokok Kantor Kesyahbandaran Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Batang melaksanakan pemberian pelayanan melalui lintas angkutan laut, keamanan dan keselamatan pelayaran di perairan pelabuhan untuk memperlancar angkutan laut. Untuk itu penulis memilih judul **“Aspek Kelaiklautan Dan Keselamatan Pelayaran Dengan Adanya Surat Persetujuan Berlayar Oleh Kantor Kesyahbandaran unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Batang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan pengamatan selama penulis melaksanakan praktek darat di Kantor Kesyahbandaran Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Batang.

Penulis mengidentifikasi beberapa masalah diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Apa Landasan Hukum yang Mengatur Mengenai Keselamatan Pelayaran ?
2. Bagaimana Peranan Kantor Kesyahbandaran Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Batang Terhadap Upaya Menyelenggarakan Program Keselamatan Pelayaran ?
3. Langkah-Langkah Apa yang dilakukan Pihak Kantor Kesyahbandaran Unit Pelabuhan Kelas III Batang Terhadap dalam Upaya Menyelenggarakan Program Keselamatan Pelayaran?
4. Hambatan-hambatan dalam penerbitan surat persetujuan berlayar di Kantor Kesyahbandaran Batang?

1.3 Tujuan dan Kegunaan penulisan

1. Tujuan Penulisan

Dalam Penulisan karya tulis ini, tujuan yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui apa saja yang harus dipenuhi agar disebut laiklaut.
- b. Untuk mengetahui dokumen membuat surat persetujuan berlayar oleh kantor kesyahbandaran.
- c. Untuk mengetahui proses dan aturan penerbitan surat penerbitan Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Kantor Kesyahbandaran Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Batang.

- d. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang terjadi dalam penerbitan Surat Persetujuan Berlayaran yang dikeluarkan oleh Kantor Kesyahbandaran Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Batang.

2. Kegunaan Penulisan

a. Manfaat bagi dunia akademik

- 1) Penulisan karya tulis ini diharapkan dapat menjadi sarana pembelajaran bagi Civitas Akademika STIMART “AMNI”.
- 2) Menambah informasi bagi taruna serta menambah bahan referensi di perpustakaan STIMART “AMNI”.

b. Manfaat bagi dunia praktisi

- 1) Diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan memotivasi perusahaan agar dapat meningkatkan kinerja dalam pelayanan jasa.
- 2) Untuk mengurangi tingkat kesalahan yang timbul selama melaksanakan pelayanan sehingga mencapai pelayanan jasa yang terkait.
- 3) Untuk mengurangi kendala – kendala yang terjadi dalam penerbitan Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Kantor Kesyahbandaran Penyelenggara Pelabuhan Unit Kelas III Batang.
- 4) Untuk mengetahui proses dan aturan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Kantor Kesyahbandaran Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Batang.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan karya tulis ini diharapkan dapat menjadi sarana mengenai susunan penulisan karya tulis ini yang penulis uraikan secara singkat dan sistematis dalam lima bab yang terdiri dari :

BAB 1 : PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan dan kegunaan penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang tinjauan pustaka sesuai judul karya tulis yang penulis ambil yaitu : “Aspek Kelaiklautan Dan Keselamatan Pelayaran Dengan Adanya Surat Persetujuan Berlayar Oleh Kantor Kesyahbandaran unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Batang”.

BAB 3 : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang sejarah singkat berdirinya Kantor Kesyahbandaran unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Batang, visi dan misi, Struktur organisasi, Tugas dan tanggung jawab Kantor Kesyahbandaran unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Batang

BAB 4 : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan meliputi tentang metode pengumpulan data, dan pembahasan pokok permasalahan.

BAB 5 : PENUTUP

Terdiri dari kesimpulan dan saran penulis terhadap permasalahan yang dibahas.